

**PERIJINAN DI KABUPATEN SRAGEN DALAM
PERSPEKTIF E-GOVERNMENT**

NASKAH PUBLIKASI

**Diajukan Kepada
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum**



**Disusun Oleh :
DERY HANTORO
R 100080053**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2012

**PERIJINAN DI KABUPATEN SRAGEN DALAM
PERSPEKTIF E-GOVERNMENT**

NASKAH PUBLIKASI

**Diajukan Kepada
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum**

Oleh :

**DERY HANTORO
R 100080053**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2012**

PERSETUJUAN

**PERIJINAN DI KABUPATEN SRAGEN DALAM
PERSPEKTIF E-GOVERNMENT**

Dipersiapkan dan disusun oleh

DERY HANTORO

NIM : R. 100080053

Program Studi : Magister Hukum

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

pada tanggal

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Harun, SH.M.Hum

Prof. Dr. Budi Murdiyasa, M.Kom

PERIJINAN DI KABUPATEN SRAGEN DALAM PERSPEKTIF E-GOVERNMENT

Oleh

Dery Hantoro¹, Harun², dan Budi Murtiyasa³

¹Dinas Dikpora Kota Surakarta

²Staf Pengajar Pasca Sarjana UMS Surakarta

³Staf Pengajar UMS Surakarta, bdmurtiyasa@yahoo.com

abstract

In an effort to provide licensing services to the community in all layers, and to improve the comfort of the community, then gradually and continuously CPM Sragen from year to year is always trying to make improvements, improvements both in terms of physical, non physical, facilities and infrastructure to meet community needs increasingly complex in licensing. The purpose of this study 1) to describe Licensing in Sragen before and after the OnLine 2) to assess the effectiveness of licensing OnLine in Sragen 3) to determine the factors that support and hinder the effectiveness of licensing in Sragen On Line 4) to know the models that want to developed in the E Government in Sragen. Before the advent of online licensing or eGovernment in Sragen, public services are still marked by a difficult to access services, the procedures involved when membeli should take care of a particular permit, the cost is not clear and the occurrence praktek extortion. After the online licensing, Sragen Government can provide a better service which permits a transparent, quick and easy. Implementation of licensing in Sragen in the perspective of E-Government can be said to be effective, because the effectiveness of online licensing in Sragen has been supported by three pillars namely law enforcement authoritative and reliable, clear legal rules and the systematic and legal awareness of high society. Factors that support the licensing on line in Sragen namely: 1) Human Resources, 2) Resource Software, 3) Hardware Resources, 4) Resource database (database), 5) Resource Network. Models who want to develop the E Government in Sragen is a one stop service through the implementation of Integrated Services Agency (CPM), is regulated under Regulation Sragen District No. 4 of 2006 with service governance set out in Sragen decree No. 9 of 2006 on guidelines Public Service in the Office of Integrated Services and Regulation Sragen Regent Sragen Number 6 Year 2005 regarding Delegation of Authority in the Field Licensing Some Sragen

Keywords: *CPM, e-Government, Online Permitting.*

ABSTRAK

Dalam usaha memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat disegala lapisan, dan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat, maka secara bertahap dan berkesinambungan BPT Kabupaten Sragen dari tahun ke tahun selalu berusaha mengadakan pembenahan-pembenahan baik dari segi fisik, non fisik, sarana dan prasarana demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks di bidang perijinan. Tujuan penelitian ini 1) untuk mendeskripsikan Perijinan di Kabupaten Sragen sebelum dan sesudah OnLine 2) untuk mengetahui efektifitas perijinan OnLine di Kabupaten Sragen 3) untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektifitas perijinan On Line di Kabupaten Sragen 4) ntuk mengetahui model yang ingin dikembangkan dalam E Government di Kabupaten Sragen Sebelum adanya perijinan online atau eGovernment di Kabupaten Sragen, pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit diakses, prosedur yang berbeli-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar. Sesudah adanya perijinan online, Pemerintah Kabupaten Sragen dapat memberikan pelayanan perijinan yang lebih baik yakni transparan, cepat dan mudah. Implementasi perijinan di Kabupaten Sragen dalam Perspektif E-Government dapat dikatakan efektif, karena berlaku efektifnya perijinan Online di Kabupaten Sragen telah didukung oleh tiga pilar pokok yaitu penegak hukum yang berwibawa dan dapat diandalkan, peraturan hukum yang jela dan sistematis dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Faktor yang mendukung dalam perijinan on line di Kabupaten Sragen yaitu : 1) Sumber Daya Manusia, 2) Sumber Daya *Software*, 3) Sumber Daya *Hardware*, 4) Sumber Daya basis data (*database*), 5) Sumber Daya jaringan. Model yang ingin di kembangkan dalam E Government di Kabupaten Sragen adalah Penerapan *one stop service* melalui Badan Pelayanan Terpadu (BPT), diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2006 dengan tata laksana pelayanan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 9 Tahun 2006 tentang pedoman Pelayanan Umum di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kabupaten Sragen

Kata kunci : BPT, e-Government, Perijinan Online

PENDAHULUAN

Pada perkembangannya pelayanan publik menjadi bagian dari administrasi pembangunan yang telah ada, sehingga merupakan kebutuhan kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan. Hal ini menuntut peran pemerintah sebagai organisasi publik untuk lebih berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat atau publik. Dalam menjalankan peran pelayanan publik tersebut, pemerintah memiliki sebuah alat yang disebut dengan birokrasi. Jadi untuk memperoleh pemerintahan yang baik, maka reformasi birokrasi merupakan sesuatu yang harus dilakukan sejak awal. Birokrasi sebagai komponen pemerintah harus dikembalikan kepada fungsi, tugas, dan prinsip pelayanan publik agar bersinergi dan berinteraksi dengan *customer oriented* yang pada hakekatnya adalah kepentingan pelayanan untuk masyarakat (Yuwono dkk, 2006 : 14).

Untuk mencapai *good governance*, diperlukan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi diperlukan agar aksi oleh satu pihak dapat dikontrol oleh pihak lainnya dan akuntabilitas merupakan konsekuensi yang harus ada agar transparansi tersebut menjadi bermakna. Di dalam pola hubungan yang transparan, masing-masing pihak dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat kepada masyarakat umum.

Fungsi pengontrolan dapat berjalan dengan baik apabila ada distribusi wewenang, tidak terkonsentrasi pada elit pemerintah yang di atas saja, dan ruang publik harus cukup tersedia bagi seluruh komponen masyarakat, suatu ruang di mana seluruh komponen dapat terlibat di dalam menyelesaikan permasalahan publik. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Konsep ini membedakan adanya kegiatan-kegiatan yang terkendali dan kegiatan-kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan-kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berkewenangan. Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas instansi pemerintah adalah kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan instansi dalam memberikan layanan yang bermutu kepada pengguna jasa, pencapaian pangsa pasar yang tinggi, serta peningkatan profit sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan.

Kebijakan pelayanan terpadu satu pintu dimulai dalam rangka perbaikan iklim usaha dan investasi, Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Instruksi Presiden tersebut sebagai kebijakan strategik yang dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan tindakan yang lebih kongkrit sebagai terobosan untuk percepatan investasi. Salah satu kegiatan atau tindakan yang sangat penting dalam Inpres dimaksud adalah, menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan untuk aktivitas investasi pada umumnya dan aktivitas Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi (UKMK) pada khususnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan konsep hukum yang keempat, yaitu hukum dikonsepkan sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik. Oleh karena itu, hukum di sini bukan dikonsepkan sebagai rules tetapi sebagai regularitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola.

Karena setiap perilaku atau aksi itu merupakan suatu realita sosial yang terjadi dalam alam pengalaman indrawi dan empiris, maka setiap penelitian yang mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi ini dapat disebut sebagai penelitian sosial (hukum), penelitian empiris atau penelitian non doktrinal. Tipe kajian ini adalah kajian keilmuan dengan maksud hanya hendak mempelajari saja dan bukan hendak mengajarkan suatu doktrin. Maka metodenya disebut sebagai metode non doktrinal (Burhan Ashofa, 2006: 32).

HASIL PENELITIAN

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya.

Strategi pelayanan prima yang mengacu kepuasan/keinginan pelanggan dapat ditempuh melalui :

- a. Implementasi visi misi pelayanan pada semua tingkat yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat (Pelanggan).
- b. Hakikat pelayanan prima disepakati untuk dilaksanakan oleh semua aparatur yang memberi pelayanan.
- c. Pelaksanaan pelayanan prima aparatur pemerintah, didukung sumber daya manusia, dana dan teknologi canggih tepat guna

Standar pelayanan prima dapat diwujudkan melalui :

- a. Kosepsi penyusutan standar pelayanan prima:
 - 1) *Concept* (gagasan terbaru dan tercanggih)
 - 2) *Competency* (kemampuan beroperasi pada standar yang tinggi dimana saja)
 - 3) *Connection* (hubungan yang baik)
- b. Prinsip pengembangan pelayanan prima
 - 1) Rumusan organisasi
 - 2) Penyebaran visi dan misi
- c. Sasaran pelayanan yang "SMART"
 - 1) *Specivic* (spesifik)
 - 2) *Measurable* (dapat diukur)
 - 3) *Achievable* (dapat dicapai)
 - 4. *Relevant* (sesuai kepentingan)
 - 5. *Timed* (jelas waktunya)

Titik perhatian dari paradigma tersebut adalah peran pemerintah sebagai organisasi publik dituntut untuk lebih berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat atau publik. Dengan melihat peran pemerintah yang lebih berorientasi pada pelayanan publik, maka demi mewujudkan kepuasan masyarakat akan pelayanan, diperlukan suatu sistem peningkatan kualitas pelayanan. Jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti:

- 1. kinerja (*performance*);
- 2. keandalan (*reliability*);
- 3. mudah dalam penggunaan (*easy of use*);
- 4. Estetika (*esthetics*)

Adapun dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (Lijan Poltak Sinambela (2006 : 6).

PEMBAHASAN PENELITIAN

Perijinan di Kabupaten Sragen sebelum dan sesudah OnLine

Belum maksimalnya layanan, tak lepas dari belum lengkap dan detilnya aturan yang ada serta peraturan yang tumpang tindih. Hal ini sejalan dengan keputusan Menpan No. 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik sebagai penyempurnaan keputusan MenPan No.81 tahun 1993 tentang pedoman tatalaksana pelayanan umum yang pada prinsipnya, layanan public harus mengacu kepada kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, serta kenyamanan. Asas pelayanan turut diatur dalam surat KepMen yang mencakup transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Standar penyelenggaraan pelayanan disebutkan sekurang – kurangnya mencakup prosedur layanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta kompetensi petugas memberi layanan.

Belum adanya perijinan online atau eGovernment di Kabupaten Sragen, pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit diakses, prosedur yang berbeli-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar, yang merupakan indicator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia. Kemudian terdapat kecenderungan diberbagai instansi pemerintah pusat yang enggan menyerahkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah otonom, akibatnya pelayanan publik menjadi tidak efisien, efektif dan ekonomis, dan tidak menutup kemungkinan unit-unit pelayanan cenderung tidak memiliki responsibilitas serta kurang representative sesuai dengan tuntutan masyarakat. Kejadian-kejadian tersebut lebih disebabkan karena paradigma pemerintahan yang masih belum mengalami perubahan mendasar.

Paradigma lama tersebut ditandai dengan perilaku aparatur negara dilingkungan birokrasi yang masih menempatkan dirinya untuk dilayani bukan untuk melayani. Padahal pemerintah seharusnya melayani bukan dilayani. Seharusnya dalam era demokratisasi dan desentralisasi saat ini, seluruh perangkat birokrasi, perlu menyadari bahwa pelayanan berarti pula semangat pengabdian yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun, yang dimanifestasikan antara lain dalam perilaku melayani, bukan dilayani, mendorong bukan menghambat, mempermudah bukan mempersulit, sederhana bukan berbelit-belit, dan terbuka untuk setiap orang bukan hanya untuk segelintir orang. Pelayanan perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen sebelum OnLine atau sebelum adanya eGovernment telah menimbulkan sebagai persepsi.

Timbulnya persepsi ini merupakan suatu hal yang wajar dan bersifat alami, karena secara psikologis masyarakat memiliki pemahan sendiri-sendiri didasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Masyarakat sebagai penerima pelayanan memiliki harapan untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik, Sementara Pemerintah Kabupaten Sragen dengan keterbatasan yang dimilikinya tidak mampu memenuhi semua harapan masyarakat. Perbedaan antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang diterimanya menimbulkan persepsi dalam masyarakat. Berbagai keluhan masyarakat atas penyelenggaraan perijinan dan non perijinan di Kabupaten Sragen yang berbelit-belit dan terlalu birokrasi, lamanya waktu, mahal biaya dalam pengurusan dokumen penduduk dan ditambah kurang adanya kepastian hukum terhadap dokumen perijinan yang diberikan kepada penduduk serta kurangnya dapat dipertanggungjawabkan data yang dihasilkan dari hasil pendaftaran, menuntut pemerintah untuk berbenah diri melakukan perbaikan Sistem pelayanan perijinan di Kabupaten Sragen.

Perijinan Kabupaten Sragen Sesudah OnLine

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology/ICT*) menjadi sangat penting dalam era globalisasi sekarang ini, karena dapat menembus jarak yang jauh bahkan melampaui batas negara sekalipun. Seiring dengan hal tersebut, saat ini mulai tumbuh dengan apa yang disebut *electronic government (egov)* sebagai implementasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan.

Perkembangan ICT yang semakin pesat harus disikapi sebagai peluang dan tantangan yang perlu diantisipasi dengan jalan menyiapkan perangkat dan sistem jaringan teknologi informasi yang dapat dengan mudah diakses dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal, semakin besarnya tuntutan demokratisasi, dan semakin transparannya akses informasi perlu disikapi dengan cepat dan tepat agar Pemerintah Daerah tetap mendapatkan kredibilitas, sehingga masyarakat mudah diajak berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan nasional. Pemerintah Daerah dituntut dapat memberikan pelayanan publik dengan memenuhi kriteria *better, cheaper, dan faster*. Selain itu diperlukan media yang mudah diakses, sehingga masyarakat sewaktu-waktu dapat mengetahui apa saja kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam rangka ikut berpartisipasi, baik dalam bentuk dukungan, sanggahan, maupun kritikan.

Realitas penggunaan ICT di lingkungan pemerintahan memunculkan istilah *egovernment* yang dalam beberapa kasus berhasil memberikan banyak nilai positif yang menggembirakan. Pelayanan publik menjadi lebih cepat, tepat, mudah dan murah. Aktivitas pemerintahan pun menjadi efektif dan efisien. Tetapi sebaliknya, ketidakberhasilan implementasi *egovernment* pada beberapa kasus sering terjadi karena belum dipahaminya secara komprehensif peranan ICT

dalam komunitas tertentu, kurangnya persiapan aparaturnya pemerintah dan rendahnya pengetahuan masyarakat. Beberapa kendala terhadap penerapan *egovernment* di berbagai daerah diantaranya :

(1). Peraturan seputar *egovernment* yang cenderung masih lemah. Misalnya Inpres No. 3/2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan *egovernment*. Dari inpres tertanggal 9 Juni 2003 itu, hanya ada satu juklak yang diturunkan, yakni standardisasi penerapan *egovernment*. Sementara *Cyber Law* (UU Informasi dan Transaksi Elektronik) juga belum ada, ini mengakibatkan tahapan ketiga *eGovernment*, yaitu transaksi menjadi terhadang. Lembaga yang menangani *eGovernment* di Indonesia, Depkominfo juga tidak mempunyai lembaga khusus di daerah sehingga menyulitkan upaya koordinasi untuk pengembangan *egovernment*.

(2). Belum adanya pemahaman yang tepat mengenai esensi *egovernment* dikarenakan lemahnya sisi sumber daya manusia (SDM). Belum siapnya SDM di kalangan pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada akhirnya, hal ini menciptakan ketidakharmonisan pemahaman mengenai *egovernment*, sehingga memunculkan implementasi yang sporadis dan berdiri sendiri. Berdasarkan catatan Biro Pusat Statistik (BPS) 2002, jumlah pranata komputer (PK—SDM TI di pemerintahan) hanya 703 orang, itupun tidak ada yang menduduki posisi tertinggi yaitu, PK Utama Madya.

(3). Problem ketersediaan infrastruktur, akses telekomunikasi sebagai hal pokok yang harus dimiliki bagi penerapan *egovernment*, belum sepenuhnya ada. Dari 66.778 desa di Indonesia, baru 23.756 yang memiliki jalur telepon atau baru tercover 33,3% dari seluruh desa. Sebagai gambaran implementasi *egovernment* di Indonesia, hanya separuh dari jumlah propinsi di Indonesia yang sudah mengaplikasikan *egovernment*. Indikatornya, 49,9% dari pemerintah propinsi, kota dan kabupaten yang memiliki situs web. Duapuluh satu website melayani pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga (C1), 22 website memberikan

layanan pembuatan akta kelahiran, kematian dan perceraian, 32 website melayani pembuatan ijin mendirikan bangunan (IMB), 14 website memberikan ijin usaha, 7 website untuk tambang galian C, 25 website untuk layanan iklan dan 20 website perdagangan. Kategori instansi pemerintah baru 12% yang sudah memiliki perencanaan dari 60 website yang ada.

Penerapan *egovernment* di Kabupaten Sragen memang banyak menjadi rujukan pmda-pmda lain. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Efendi selaku Pegawai di Pemkab Sragen mengatakan bahwa, Pemerintah Kabupaten Sragen sudah menerapkan *egovernment* secara penuh. Hasilnya, Pemkab Sragen memiliki beberapa jenis layanan publik unggulan. Tujuan menerapkan *egovernment* adalah untuk meningkatkan kinerja administrasi dan pelayanan publik.

Perdagangan dalam pemberian perizinan usaha perdagangan secara elektronik (*e-licensing*). Untuk mengetahui respons warga, setiap enam bulan sekali Pemerintah Kabupaten Sragen bekerja sama dengan LSM, melakukan survei kepuasan warga atas layanan publik sebagai alat ukur efektivitas penerapan *egovernment*. Prestasi Pemerintah Kabupaten Sragen juga didapatkan dari situs web Pemerintah Kabupaten Sragen yang beberapa kali mendapat anugerah dari majalah warta ekonomi, yang terakhir diterima Tahun 2007.

Saat ini sudah 59 izin dan 10 non-perizinan yang di proses menggunakan *egovernment*. Kabupaten Sragen juga sudah mempunyai 13 aplikasi sistem untuk kantor pemerintah dan rumah sakit serta sudah membangun jaringan sampai ke 208 desa dan menyerahkan 17 izin yang bisa diurus pada tingkat kecamatan, sementara tahun lalu baru dilakukan untuk 13 izin. Kendala, sudah menjadi kelaziman dalam setiap usaha, demikian pula terjadi di Kabupaten Sragen yang memiliki luas 94.155 ha dan berpenduduk 849.441 (Kabupaten Sragen, 2001).

Awal penerapan *egovernment* di Kabupaten Sragen dimulai dengan sedikitnya jumlah staf teknis yang menangani, ketidaktahuan akan Teknologi Informasi di satuan-satuan kerja dan para penentu kebijakan. Solusi yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan merekrut Sumber Daya Manusia lulusan TI dan Komputer, disamping sosialisasi dan pelatihan TI bagi operator-operator di satuan kerja. Saat ini dengan terpenuhinya tenaga-tenaga teknik di berbagai bidang TI, Pemerintah Kabupaten Sragen yang terletak di bagian selatan Jawa Tengah itu pun bahkan sudah banyak membantu daerah lain sebagai konsultan eGovernment pada khususnya, antara lain di lima Kabupaten yakni Lebak Banten, Balangan Kalimantan Selatan, Kota Dumai Riau. Sedangkan beberapa daerah yang akan menyusul dikerjakan, antara lain adalah Kabupaten Bone, Maros, Bangli Bali, Pacitan, Banyuwangi dan Kabupaten Tegal. “Faktor utama berhasilnya penerapan *eGovernment* adalah komitmen dari semua pihak.

Bagian Litbang dan Data Elektronik Sekretariat Daerah mengkoordinir tiga Sub Bagian (SubBag), yakni SubBag Litbang, SubBag Distek (Diseminasi Teknologi), dan SusBag PDE. Total SDM di bagian Litbang dan Pengelolaan Data Elektronik(PDE) berjumlah 21 orang. Dan jumlah itu, tercatat 7 orang yang mempunyai latar belakang informatika dan mengerti TI secara teknis. Meski terbatas, kru PDE bertanggung jawab bila terjadi kendala komputer atau jaringan di dinas kerja maupun kecamatan. Sebenarnya, bisa saja pembangunan TI diserahkan kepada pihak ketiga. Hanya saja, sudah menjadi kesepakatan antara jajaran PDE, Bupati dan DPRD, bahwa urusan TI akan ditangani sendiri. Terkecuali dalam hal pemasangan tower Pemerintah Kabupaten Sragen masih menggunakan jasa pihak ketiga, sementara semua pembangunan aplikasi dapat ditangani sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. Saat ini, pemerintah kabupaten tengah berancang-ancang untuk mendirikan *Internet Services Provider (ISP)* sendiri, dengan memanfaatkan Sistem Komunikasi Dalam Negeri (Siskom-Dagri).

Untuk tujuan mengintegrasikan sistem di seluruh desa, total desa di Kabupaten Sragen adalah 208 Desa serta digunakan untuk peningkatan kualitas dan kehandalan sistem. Arah Pengembangan *eGovernment* Kabupaten Sragen Landasan Filosofi bagi Pengembangan Sistem Teknologi Informasi di Kabupaten Sragen, sebagai pedoman menuju terciptanya Kabupaten Sragen sebagai “*CYBER REGENCY*” adalah Visi-Misi yang mendukung tujuan/proyeksi Pemerintah Kabupaten Sragen, bahwa pada Tahun 2010 semua Satker, Kecamatan, BUMD, Desa/Kelurahan sudah terjangkau Jaringan Sistem Informasi yang terintegrasi secara on-line, sehingga pelayanan publik akan optimal dan masyarakat terbiasa memanfaatkan IPTEK.

V I S I Kabupaten Sragen, “Terwujudnya Sragen Sejahtera didukung Sistem Informasi Yang Terintegrasi Dengan Dilandasi Hasil Kajian Kegiatan dan Penelitian yang Akurat “

M I S I Kabupaten Sragen,

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang optimal melalui Jaringan Sistem Teknologi Informasi Yang Terintegrasi secara Online.

1. Terwujudnya kualitas SDM yang handal berwawasan IPTEK.
2. Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi Yang Efektif.
3. Terwujudnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Akurat dan *Applicable*.

Infrastruktur *eGovernment* yang terdapat di Kabupaten Sragen antara lain Jaringan Online 24 jam. Jaringan yang terkoneksi selama 24 jam sehari 7 hari seminggu pada semua kecamatan, semua desa, semua dinas dan semua SKPD, dengan 125 buah PC. Sistem Koneksi Jaringan Base Station (*Network Operation Centre – NOC*). Tower triagle 48 meter. Antena *Omni*, *Grid* dan *sectoral*. *Wireless Radio Acces Point*, *Server*, *Router*. Sistem teknologi *Wide Local Area network* (WLAN) dengan perangkat wireless pada frekuensi 5.8 GHz di 5 lokasi Kecamatan yang berfungsi sebagai *Repeater Client*.

1. Lingkungan Kantor Bupati/Setda Koneksi *Local Area Network* (LAN) dengan kabel UTP/STP dan *Switch Hub*.
2. Diluar lingkungan kantor Setda Sistem teknologi WLAN dengan perangkat wireless 2,4 GHz Hotspot.

Koneksi Intranet/internet untuk publik dipasang di lingkungan Rumah Dinas Bupati/Pendopo, Kompleks Setda dan Alun-alun Sasono Langen Putro. Aplikasi / Sistem Informasi,

1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - KANTAYA (Kantor Maya).
2. SIM Perijinan Terpadu.
3. SIPAW (Sistem Informasi Perdagangan Antar Wilayah).
4. SIM Kepegawaian.
5. SIM Keuangan Daerah.
6. SIM Kependudukan.
7. SIM Pertanahan.
8. Billing System RSUD.
9. Sistem Informasi Strategis.
10. SIM Pendapatan Daerah.

Aplikasi Manajemen Sistem Informasi Monitoring Daerah berbasis web untuk mempermudah jalannya sistem perkantoran antar seluruh pegawaiPekab Sragen, yaitu:

1. Report Monitoring setiap Dinas / Satker dan Kecamatan.
2. Sarana pengiriman Data melalui Sistem Aplikasi Online.
3. Informasi dan Monitoring Proyek secara OnLine pada setiap Satker.
4. Agenda Kerja dan Surat Dinas pada setiap Satker.
5. Forum Diskusi dan Chating antar Personil dan Satker.

Kemampuan dan Jasa Layanan IT *Computer Networking* : LAN & WAN
 Kerjasama Assistensi Teknis Pengembangan IT dengan daerah lain Profit : - Memperluas Jaringan Kerjasama antar daerah *Professional Fee*, Pengalaman / Peningkatan Ketrampilan, Pemrograman: *Web Programming, Aplikasi Sistem Informasi* (SIMDA, SIMPADA, SIMBADA, SIMPEG PILKADA, SIM PERIJINAN). Desain Grafis: *Brochures, Leaflets, Report Cover, Poster*, Majalah, Survey dan Analisa menggunakan Sistem Informasi Geografi: Peta Tata Guna Lahan dan tuupan lahan (landuse & landcover), Peta Deteksi Bencana Alam, Tata Kota, Land & Road Survey, etc). Internet Service Provider (ISP). Kerjasama *Re-Sales ISP (Internet Service Provider)* dengan pihak ke-3.

MOU dengan PT. TimeExelindo. Kerjasama ISP dengan Sekolah (Internet School dan Masyarakat Hardware Services : Monitor, CPU, Printer, *Computer Peripherals*, etc Pembuatan Dan Pengembangan *WebSite* Untuk menjawab tantangan globalisasi serta meraih peluang yang menguntungkan pada masa yang akan datang, kebijakan pemerintah Kabupaten Sragen dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di buat pula Website Pemda Sragen : [http:// www.sragenkab.go.id](http://www.sragenkab.go.id).

e-Government, sebagai sebuah konsep memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, tetapi pengertian maupun penerapannya di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dari sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi masing-masing negara. *eGovernment* didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, dimana pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Indrajit, 2002: 45).

Visi *eGovernment* dilandasi pada empat prinsip-prinsip dasar *eGovernment*, yaitu:

1. Memberikan perhatian penuh pada jenis-jenis pelayanan publik, dengan prioritas
2. Memiliki volume transaksi yang besar dan melibatkan banyak sekali sumber daya manusia.
3. Membutuhkan interaksi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat.
4. Memungkinkan terjadinya kerja-sama pemerintah dengan swasta maupun LSM dan Perguruan Tinggi. setelah menentukan jenis pelayanan, kemudian menentukan ukuran kinerja, yang menjadi target manfaat sebelum menentukan total biaya investasi.
5. Membangun lingkungan yang kompetitif, dimana sektor swasta maupun LSM dapat berperan dalam hal pelayanan publik. Bahkan sektor swasta dan LSM dapat bersaing dengan pemerintah dan dapat melayani dengan lebih baik.
6. Memberikan penghargaan pada inovasi dan memberi ruang kesempatan pada kesalahan.
7. Memusatkan pada pencapaian efisiensi, yang dapat dinilai dengan besarnya manfaat dan pemasukan anggaran dari penggunaan eGovernment.

SIMPULAN

Deskripsi Perijinan di Kabupaten Sragen sebelum dan sesudah OnLine

Sebelum adanya perijinan online atau eGovernment di Kabupaten Sragen, pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit diakses, prosedur yang berbeli-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar. Sesudah adanya perijinan online, Pemerintah Kabupaten Sragen dapat memberikan pelayanan perijinan yang lebih baik yakni transparan, cepat dan mudah.

Efektifitas perijinan OnLine di Kabupaten Sragen

Implementasi perijinan di Kabupaten Sragen dalam Perspektif E-Government dapat dikatakan efektif, karena berlaku efektifnya perijinan Online di Kabupaten Sragen telah didukung oleh tiga pilar pokok yaitu penegak hukum yang berwibawa dan dapat diandalkan, peraturan hukum yang jela dan sistematis dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Faktor-faktor yang mendukung dan efektifitas perijinan On Line di Kabupaten Sragen

Faktor yang mendukung dalam perijinan on line di Kabupaten Sragen yaitu : 1) Sumber Daya Manusia, 2) Sumber Daya *Software*, 3) Sumber Daya *Hardware*, 4) Sumber Daya basis data (*database*), 5) Sumber Daya jaringan.

Model yang ingin dikembangkan dalam E Government di Kabupaten Sragen

Model yang ingin di kembangkan dalam E Government di Kabupaten Sragen adalah Penerapan *one stop service* melalui Badan Pelayanan Terpadu (BPT) yang hanya berlaku sesuai ketentuan atau peraturan yang di buat Bupati Sragen berdasarkan kondisi social ekonomi masyarakat Sragen, tanpa melibatkan pihak Pemerintah Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaharuan
- Burhan Ashshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum : Sebuah Telaah sosiologi*, Semarang PT.Suryandaru Utama.
- Eran Vigoda-Gadot. *Collaborative Public Administration Some Lessons From the Israeli Experience. Departement of Political Science, Faculty of Social Science. University of Haifa Israel. 2004. www.emerald.com Diakses 30 Juni 2008*
- Eko Indrajit, 2009. *Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*. Jakarta PT Elexmedia komputindo
- Handi Irawan, 2007. *10 Prinsip Kepuasan Pelanggan*. Jakarta : PT Elex Komputindo
- H.A. Moenir, 1997, *Manajemen Pelayanan Umum*, Jakarta, Bumi Aksara.
- HB. Sutopo. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT Gramedia Media Sarana Indonesia, Jakarta
- J.B. Kristiadi, 1996, *Administrasi dan Manajemen Pembangunan*, Jakarta, LAN.
- Satjipto Raharjo, 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni
- Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Sedarmayanti, 2009, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*, Bandung : Refika Aditama.
- Wasisistiono.2003.*Pengelolaan Sektor Perhubungan dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Bandung : Fokus Media